

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hegemoni adalah sebuah bentuk dominasi dari satu kelompok atas kelompok lain yang dilakukan tidak dengan cara fisik atau pemaksaan (Koersif) tetapi dengan cara konsensus yang didapat melalui pengaruh ekonomi, budaya dan ideologi. Lebih lanjut Antonio Gramsci (1935) sebagai pencipta teori ini mengatakan persetujuan sebagai bentuk pengendalian masyarakat yang dapat menciptakan suasana wajar atau alami bagi kelompok yang terhegemoni dalam hal ini adalah masyarakat. (Arief, 1999)

Hal demikian dapat terjadi bukan hanya karena penguasaan ekonomi saja seperti dalam sejarahnya tetapi juga pengendalian melalui lembaga seperti media, agama hingga budaya. Jika dikaitkan dalam konteks politik Indonesia pada Pemilu tahun 2024, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden memiliki akses kekuasaan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukungnya.

Dalam teori kekuasaan yang diciptakan oleh Max Weber Jokowi sebagai seorang Presiden Republik Indonesia mendapatkan legitimasi dukungan melalui aspek legitimasi karismatik dan legal rasional hal ini dapat dilihat dari anggapan masyarakat tentang sosok Jokowi sebagai pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan serta memiliki basis masa pendukungnya sendiri yaitu Pro Jokowi (PROJO), perjalanan karir politiknya yang mulus dan dengan gaya populismenya selama menjabat sebagai Presiden cukup untuk menggaet hati rakyat (Efendi, 2023).

Di periode keduanya tentu Presiden Jokowi berusaha untuk meninggalkan *legacy* atau capaian kerja selama 10 tahun menjabat serta berusaha tetap menarik kepuasan publik terhadap dirinya. Mencari penerus kepemimpinan negara menjadi hal yang krusial, maka tidak mengherankan ketika Presiden

Jokowi terlihat lebih aktif diakhir jabatannya, Urgensi keberlanjutanpun semakin santer dikatakan mengingat banyak proyek strategis yang harus segera dirampungkan, ketika hal ini dapat dicapai maka bukan tidak mungkin akan mendongkrak elektabilitas.

Tetapi sebagai seorang pejabat publik maka etika yang harus dijalankan adalah sikap netral atau tidak memihak pada salah satu calon sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dimana terdapat pasal yang membatasi pejabat negara ikut serta dalam kampanye termasuk penggunaan kewenangannya. Dalam aturan tersebut maka seorang pemangku jabatan harus membedakan hak politiknya sebagai warga negara dan sebagai pejabat publik

Akan tetapi dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi terlihat tidak konsisten dengan pernyataannya seperti ketika berpidato pada 29 Mei 2023 dengan pemimpin redaksi media yaitu Helmi Yahya dan Akbar Faisal bahwa *“demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe”*. Di lain kesempatan pesan untuk netral juga disampaikan Presiden Jokowi pada oktober 2023 ketika para pejabat daerah di undang ke istana negara (Putu, 2023).

Adanya Pernyataan yang tidak konsisten dari Jokowi ternyata berlanjut hingga adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2023 tentang batas usia pencalonan Presiden dan wakil Presiden dimana dalam sidang tersebut terjadi perubahan atau penambahan dalam nomenklatur tentang syarat usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang termaktub dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dalam putusannya Mahkamah Kontitusi menyatakan bahwa seseorang belum berusia 40 tahun dapat maju menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah.

Kata *“berpengalaman menjadi kepala daerah”* yang sebelumnya tidak tercantum dalam undang-undang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dan dari peristiwa ini muncul dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Presiden Jokowi yang disebut dengan istilah *Abuse of power*, (penyalahgunaan wewenang) yang berakibat

pada lolosnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil Presiden yang sekaligus adalah putra dari Presiden.

Adanya dugaan *Abuse of Power* yang dilakukan Jokowi berkaitan dengan pemilu adalah penggunaan fasilitas negara seperti ketika Jokowi melakukan makan siang bersama Prabowo saat sedang melaksanakan dinas yang dilihat banyak masyarakat, lalu ibu negara Iriana Widodo mengacungkan tanda dua jari ketika sedang berada didalam mobil dinas yang notabene adalah fasilitas negara dan ini sebagai bentuk pesan dukungan secara simbolik serta banyaknya berita yang mengatakan bahwa terdapat adanya mobilisasi melalui pejabat Gubernur (PJ) serta untuk menggerakkan akar rumput dan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos).

Hal demikian dapat dilihat ketika terjadi kenaikan anggaran untuk bansos menjelang pemilu yang angkanya hampir sama ketika terjadinya krisis covid19 tahun 2020, kendati Menteri keuangan mengatakan bahwa hal tersebut telah disepakati sebelumnya dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, sejalan dengan itu menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa dalam tiap pemilu maupun pilkada ada kecenderungan dilakukannya politisasi bansos.

Salah satu peristiwa pembagian bantuan sosial yang terjadi pada 13 April 2023 ketika Presiden Jokowi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erik Thohir membagikan bingkisan berwarna biru muda yang merupakan warna kampanye Prabowo-Gibran kepada pengguna jalan di depan istana negara, lalu pada awal Januari di daerah Kendal Jawa Tengah pembagian bansos mengatasnamakan Jokowi bukan atas nama negara yang diucapkan Zulkifli Hasan selaku Menteri sekaligus ketua partai PAN dan sebagai anggota koalisi Prabowo-Gibran.

Jelas hal ini melanggar aturan dan etika yang telah tercantum dalam UU pemilu tersebut. Adanya dugaan intervensi dan politisasi bansos ini melahirkan pelanggaran etika dalam konteks politik dan peristiwa-peristiwa tersebut mengarah hanya pada satu pasangan saja yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil presiden Prabowo-Gibran. (Aryo, 2024).

Tindakan yang terjadi dalam kontestasi politik di Indonesia ini juga terjadi diberbagai negara demokrasi lainnya yang juga mengaitkan dengan Presiden petahana serta adanya tindakan yang dianggap melanggar baik secara represif atau hegemonik, contohnya pelaksanaan pemilu di negaranegara benua Amerika seperti Amerika Serikat, Brazil dan Chile. Dalam sebuah penelitian dari Amri Hakim (2023) yang mencoba menggali bentuk keberpengaruhannya Presiden petahana kepada Presiden yang didukung, teori kepuasan publik dari Robert Dahl serta penggunaan metode kualitatif pendekatan eksplanatif dan mengambil data kepustakaan yang telah ada untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel tersebut.

Pelaksanaan demokrasi dalam negara-negara tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Calon Presiden yang didukung oleh Presiden petahana yang memiliki tingkat kepuasan publik mencapai 50% atau lebih akan memiliki tingkat kemenangan yang tinggi dalam sistem popular vote, adapun indikator lain yang didapat adalah bahwa calon presiden tersebut adalah Menteri dari Presiden petahana.

Dalam konteks pemilu di daerah juga terjadi proses penghegemonian dari partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menekankan aspek ideologi kepada masyarakat kota Depok Jawa Barat. Penelitian dari Wahidin (2024) yang dalam penelitiannya berusaha mengungkapkan bagaimana PKS mampu menang dalam empat pilkada yang telah dilaksanakan, sesuai dengan teori Gramsci tentang hegemoni melalui ideologis, kaum intelektual dan kepemimpinan politik penggunaan pendekatan kualitatif berupa wawancara dan studi pustaka sebagai pengumpulan datanya dan berkesimpulan bahwa kemenangan PKS didaerah tersebut karena adanya penyebaran ideologi keislaman yang sejalan dengan kepercayaan mayoritas masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan dari adanya bentuk-bentuk hegemoni dari kelompok dominan dalam konteks politik dalam skala negara dan daerah tersebut yang menjadi pembahuran dalam penelitian ini adalah bahwa pengaruh atau tindakan dukungan dari seorang pemimpin yang mendukung pasangan calon presiden dalam pemilu sampai kepada hal terkecil dalam suatu wilayah dimasyarakat

dengan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang membentuk suatu pemahaman dalam masyarakat yang tidak hanya dilakukan dengan popularitas dan ideologi akan tetapi juga ekonomi serta politik.

Berkaitan dengan hal demikian kedewasaan masyarakat Indonesia dalam memandang politik demokrasi juga berbeda dengan negara yang telah lebih mapan seperti Amerika Serikat hal ini semakin diperkuat oleh karakter masyarakat Indonesia dan salah satu daerahnya yaitu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang cenderung melihat pada sosok individu atau *leadercentric* dalam orientasi politiknya dimana figur lebih berpengaruh daripada partai atau bahkan kebijakannya sekalipun (Fieda, 2024).

Hal ini dapat dilihat dari bagaimana tanggapan atau respon satu kelompok masyarakat terhadap berjalannya suatu kontestasi politik dalam kabupaten Indramayu ketika terjadi pembagian bantuan sosial berupa bahan pokok atau uang bukan dinamai dengan istilah “bantuan sosial” akan tetapi “bantuan Jokowi” sehingga menimbulkan persepsi bahwa hal demikian berasal dari satu sosok pejabat publik.

Adanya tim pemenangan juga memiliki andil dalam menyebarkan pengaruh pembentukan persepsi publik yang didukung pula oleh pemberitaan di media, kemudahan dan kecepatan akses untuk mendapatkan informasi menjadi salah satu bentuk mempengaruhi yang efektif, melalui komunikasi politik yang disampaikan akan langsung dikonsumsi dan disebarluaskan kembali kepada publik hal demikian berlaku juga kepada pemberitaan negatif yang disebarluaskan .

Penggunaan sistem satu orang satu suara menjadi titik tekan untuk menjaring suara masyarakat yang memiliki tingkat budaya politik pada taraf parokial atau kaula sehingga pembentukan pengaruh melalui pendekatan ekonomi dan media menjadi lebih efektif dan memunculkan sifat favoritisme kepada satu orang yang mereka dukung.

Sosok Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang juga digemari oleh masyarakat memiliki tingkat kepuasan publik yang stabil yaitu berada diangka 50% hal demikian menjadi suatu modal tersendiri yang selalu diberitakan oleh

berbagai lembaga survei dan ini menjadikan Jokowi sebagai sponsor politik yang kuat dalam kontestasi politik nasional tahun 2024.

Dalam pelaksanaan pemilu setiap pasangan calon Presiden memiliki daerah yang dijadikan basis dukungan bagi mereka, Jokowi dan PDIP misalnya dikenal dengan basis dukungan yang kuat di Provinsi Jawa tengah karena asas kedaerahan Jokowi di Solo Jawa tengah, akan tetapi hal demikian belum cukup, maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan di wilayah lain untuk menambah suara dukungan.

Salah satu provinsi yang menjadi kunci mendapatkan suara bagi calon Presiden yang akan bertanding dalam kontestasi politik adalah Provinsi Jawa Barat, KPU mengatakan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Barat pada pemilihan presiden 2024 mencapai 35.714.901 adapun hasil suara di Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2024 memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dengan perolehan suara 16.805.854 mengikuti ada pasangan Anies-Muhaimin dengan angka 9.099.674 suara dan GanjarMahfud 2.820.995 suara.

Akan tetapi terjadi salah satu perubahan dalam perolehan suara kemenangan pada pemilu 2019 dengan 2024 yaitu di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dilansir dari data KPU pada pemilu 2019 Prabowo kalah dengan hanya meraih 282.349 suara, sedangkan Jokowi meraih 707.324 suara. Dan pada tahun 2024 Pasangan Prabowo-Gibran meraih angka sebesar 716.780 suara, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 131.030 suara dan Ganjar Mahfud memperoleh 174.026 suara dengan jumlah 1.373.776 DPT.

Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU tersebut dapat dikatakan bahwa pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalam perolehan suara diseluruh kecamatan di Kabupaten Indramayu yang berjumlah 31 kecamatan hal ini menjadi suatu hal yang baru karena Prabowo subianto dalam dua pemilu sebelumnya selalu kalah dalam perolehan suara di Kabupaten Indramayu.

Adapun hasil suara yang diperoleh untuk Anies- Muhaimin berjumlah 3.452 lalu Prabowo-Gibran dengan angka 22.996 dan Ganjar-Mahfud memperoleh 5.212 dengan keseluruhan suara sah 31.660 dengan data tersebut maka ini

menjadi kemenangan mutlak bagi pasangan PrabowoGibran di Kabupaten Indramayu.

Kabupaten Indramayu sendiri secara geografis merupakan daerah di utara Jawa Barat yang berbatasan dengan kabupaten Subang dibarat dan kabupaten Cirebon di timur serta memiliki 31 kecamatan. Adapun mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan serta sebagian sebagai pedagang daerah Indramayu juga dapat dikatakan sebagai daerah yang belum mengalami kemajuan yang pesat dan pembangunan yang belum merata.



Sumber : Indramayu.go.id

Gambar 1.1 Peta wilayah kabupaten Indramayu

Adanya pembangunan dan tingkat pendidikan yang tidak merata akan mempengaruhi budaya atau kebiasaan masyarakat yang cenderung bersifat tradisional, dan karena itu berdampak pada tingkat kekritisan masyarakat di beberapa wilayah dalam memandang konteks politik, hal demikian yang menjadi titik tumpu dilakukannya hegemoni oleh seorang atau kelompok kepentingan baik secara langsung atau penyebaran melalui media.

Dari adanya perubahan suara yang diperoleh oleh calon Presiden Prabowo di Kabupaten Indramayu ini terdapat kaitan dengan bentuk dukungan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo baik secara eksplisit maupun implisit yang dilakukan melalui media dengan memberikan simbol-simbol dukungan atau pemberian bantuan sosial yang ikut merubah

perilaku pemilih dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 di Kabupaten Indramayu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tentang bentuk dukungan Jokowi dengan melakukan dugaan tindakan menyalahi etika pejabat publik yang berdampak terhadap kemenangan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Prabowo-Gibran bisa didapatkan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk strategi hegemoni politik Presiden Jokowi dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka?
2. Bagaimana dampak strategi Hegemoni Politik Presiden Jokowi terhadap kemenangan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan bentuk strategi hegemoni politik Presiden Jokowi untuk mendukung pasangan prabowo-gibran
2. Untuk menggambarkan dampak strategi hegemoni politik Presiden Jokowi terhadap kemenangan pasangan Prabowo subianto Gibran Rakabuminng Raka di Kabupaten Indramayu

D. Manfaat Penelitian

Ada bebrapa harapan dalam dilakukannya penelitian ini, salah satunya adalah kebergunaan atau kebermanfaatan bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini besar harapannya mampu menyumbangkan pengetahuan serta kontribusi pemikiran baru khususnya diranah Ilmu politik
- b. Penelitian atau hasil ini semoga dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat bagi civitas akademik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan yang telah penulis dapat dalam memnempuh pendidikan sehingga bermanfaat untuk penguataan intelektual dan perluasan wawasan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah ataupun masyarakat tentang kondisi sosial politik yang terjadi dimasyarakat yang memiliki kecenderungan utama pada ketokohan yang memiliki efek negatif berupa pengaruh secara ideologis hingga menimbulkan fanatisme dalam politik.

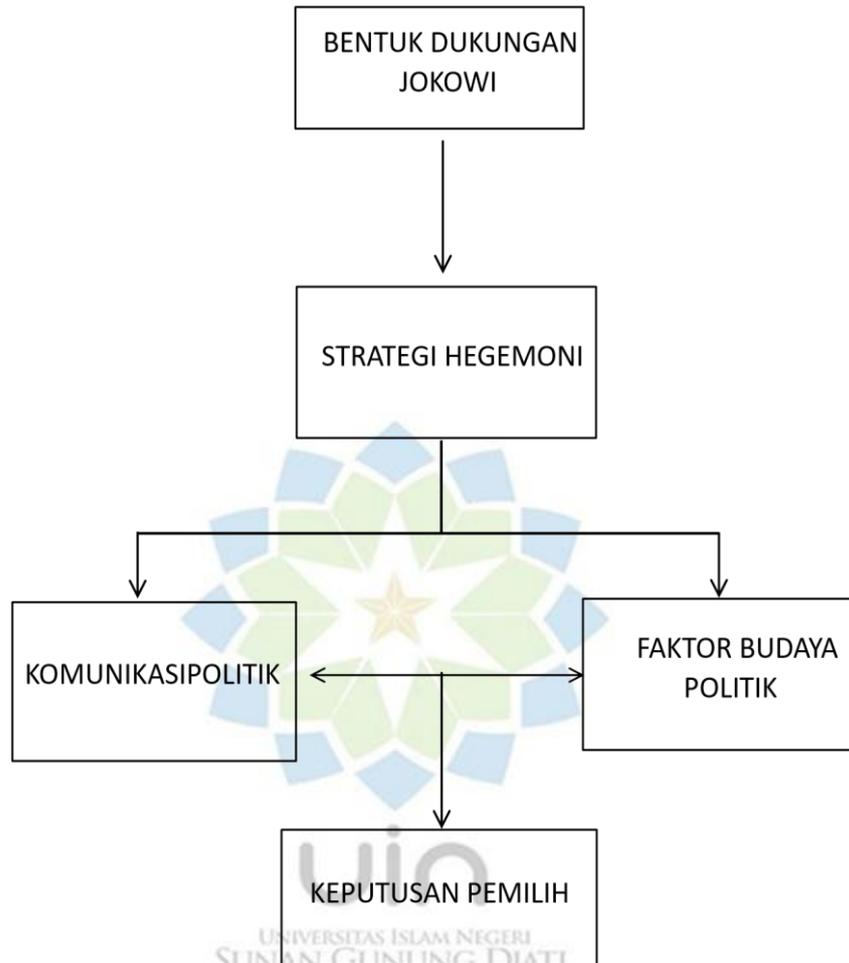
E. Kerangka Berpikir

Konsep Hegemoni Gramsci menjelaskan bahwa terjadinya penguasaan tidak harus menggunakan suatu paksaan (Koersi) akan tetapi bisa dilakukan dengan menyebarkan ideologi, budaya atau ekonomi secara halus dicapai melalui kontrol-kontrol lembaga seperti lembaga pendidikan, media, bahkan sosial agama dan diakhiri dengan capain suatu konsensus.

Pengendalian atas instrumen-instrumen tersebut paling mungkin dilakukan oleh pihak dominan atau penguasa negara dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pemegang struktur dan suprastruktur, dan Jokowi sebagai penguasa memiliki akses tersebut sehingga menjadi sorotan publik. Penyebaran ide-ide hegemonik dapat dilihat dari bagaimana kelompok terhegemoni bergantung, seperti dalam sejarahnya kegagalan revolusi sosialis Italia gagal karena kaum buruhnya terhegemoni oleh kaum borjuis pemilik modal baik ketika komunikasi politik yang dilakukan atau kontrol dalam sistem.

Secara sosial budaya di masyarakat serta tingkat pendidikan yang buruk, ekonomi yang lemah dan tingkat kekritisian berpikir yang terbatas mempengaruhi terjadinya hegemoni yang dalam pelaksanaannya diakhiri pada lahirnya sikap kesukarelaan mengikuti apa yang diinginkan penghegemoni atau kelompok dominan.

Untuk lebih memperjelas tentang kerangka penelitian pemikiran ini, dapat dilihat gambar berikut :



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

sebagai kepala negara tentu Jokowi memiliki kewenangan yang besar serta sumber daya yang kuat pula selain dari aspek kepopularitasannya, kekuatan yang dominan ini pun dapat berdampak untuk menggiring suara pemilih yang belum masuk ke bilik suara Prabowo-Gibran.

Pembangunan narasi publik dengan kalimat keberlanjutan yang ditinjau dari aspek keberhasilan pembangunan infrastruktur serta pernah tercapainya rekonsiliasi politik menjadi hal yang diangkat pada tiap kampanye terutama dari pasangan Prabowo-Gibran, adanya narasi keberlanjutan tersebut akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa dengan memilih calon Presiden yang mendukung program keberlanjutan dianggap pilihan yang rasional.

Komunikasi politik sendiri menurut Dan Nimmo (2000) adalah pertukaran simbol atau pesan terkait antara politisi, media dan masyarakat untuk mencapai tujuan politik seperti mempengaruhi kebijakan publik atau membangun dukungan.

Sebagai contoh Jokowi sering menjawab pertanyaan dari wartawan tentang netralitas pejabat dan Jokowi pun menjawab bahwa dukungannya adalah hak personal, pembagian bansos dengan kantong warna biru muda juga dapat diartikan sebagai bentuk simbol komunikasi.

Penyampaian komunikasi politik selain erat dengan media namun juga berkaitan juga dengan faktor budaya dan sosial disuatu daerah dan relevansi topik yang disampaikan menjadi hal kunci. Adapun bentuk penyesuaiannya adalah seperti tingkat konsumsi media, penggunaan bahasa, norma yang dipegang atau budaya yang dilakukan serta agama tertentu.

Dalam hal ini Jokowi sering kali menggunakan baju adat sebagai bentuk kelokalan atau mendatangi tokoh berpengaruh seperti tokoh adat sebagai bentuk penghormatan serta menggunakan narasi religius untuk menunjukkan kedekatan dengan tokoh agama.

Pendekataan yang dilakukan Jokowi tersebut akan berimplikasi pada bagaimana masyarakat memutuskan pilihannya dalam politik, hal

ini berkaitan dengan perilaku pemilih yang dapat dibedakan menjadi tiga, *pertama* pendekatan sosiologis, *kedua* pendekatan psikologis dan *ketiga* pendekatan rasional.

Hal demikian juga dikatakan oleh Gabriel Almond dan sigmun Verba (1984) yang menyatakan tentang budaya politik merupakan pola perilaku dan orientasi masyarakat terhadap sistem politik, aktor politik dan proses politik yang terjadi.

Tipologi budaya politik dibagi menjadi tiga, *pertama* budaya politik parokial yaitu tingkat kesadaran politik masyarakat yang rendah, *kedua* kaula atau subjek dimana kesadaran politik masyarakat telah tumbuh namun tingkat partisipasi yang terbatas dan *ketiga* budaya politik partisipan dimana tingkat kesadaran dan partisipasi politik tinggi.

jika ditinjau dari kebiasaan masyarakat secara langsung maka mayoritas pemilih dipengaruhi oleh ikatan dan pengaruh sosial seperti ekonomi, agama dan lingkungan, hal-hal demikian lah yang menjadi titik tumpu untuk dijalankannya hegemoni baik yang dilakukan Jokowi atau pendukungnya dalam pembentukan suatu konsensus dalam masyarakat.

Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilu tahun 2024 dengan meraih suara hingga 58% menjadi suatu capaian besar mengingat dalam tiga pemilu yang sudah dijalani Prabowo subianto sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden selalu mengalami kekalahan. Rekam jejak dari Prabowo Subianto serta dua kali melawan Jokowi selalu menjadi batu ganjalan

Akan tetapi pada pemilu tahun 2024 justru sosok Jokowi kini berada dalam barisan pendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka menjadi representasi sosok Jokowi sendiri, adanya rangkaian peristiwa yang terjadi menjelang pemilu hingga naiknya isu *Abuse of power* atau tindakan nepotisme yang mengarah pada pasangan Prabowo-Gibran bisa dikatakan sebagai iktiar politik dari Jokowi.

Selain itu daerah yang menjadi kantong-kantong suara dari PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud seperti Jawa Tengah justru didominasi oleh pemilih Prabowo-Gibran yang dilihat dari perolehan suaranya, demikian juga yang terjadi di daerah Kabupaten Indramayu yang pada pemilu sebelumnya didominasi pemilih Jokowi namun pada pemilu tahun 2024 justru dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran dengan angka yang cukup signifikan.

Faktor budaya dan orientasi politik masyarakat yang masih pada favoritisme politik atau pandangan ketokohan mendorong pada kecenderungan untuk dipengaruhi dalam aspek ideologi, ekonomi dan budaya. Jokowi sebagai tokoh favorit dan penguasa serta memiliki akses struktur dan suprastruktur yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu konsensus hasil dari penghegemonian.

